

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR DI PERIGI KECAMATAN SUELA LOTIM NTB

Aswasulasikin

STKIP Hamzanwadi Selong

ABSTRACT

This study aimed to investigate the: (1) forms of community participation in administering elementary school at Perigi, (2) strategies to increase the community participation in administering elementary school at Perigi, and (3) obstacles of community participation in administering elementary school at Perigi.

This study is an empirical study using a descriptive qualitative approach. The subject of research was determined using the purposive sampling method. Data collected through observation, interview, documentation, and were analyzed using the *Interactive Model* techniques from Miles and Huberman. Subject In this study, school principals, heads of school committees, young people, and community.

The result of analysis shows that: (1) the people at Perigi only participated when they were asked to share work in building school facilities, but they are not involved in planning, conducting, and evaluating. (2) school principals, together with the heads of school committees, come to the community only when some students are absent from school, but no efforts or strategies conducted by the school and local government to increase the community participation in other ways, (3) The obstacles for community participation in running elementary education at Perigi are the low level of educational background of the community, the low level of people's income, and the culture.

Keywords: community participation, primary school, *Lombok Timur*

PENDAHULUAN

Penerapan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan baik dilihat dari segi jenjang pendidikan maupun dari segi geografisnya. Demikian juga dengan kualitas pendidikannya masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini bahkan di Asia sekalipun. Hal ini harus segera diperhatikan dan dicari

solusinya melalui usaha-usaha yang terencana dan sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM), baik itu tenaga pendidik dalam hal ini guru, manajemen pendidikan misalnya dari pihak pemerintah dan pengelola sekolah, serta masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tanpa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, sedangkan dalam menciptakan sekolah yang efektif dan berkualitas, masyarakat dan pihak sekolah harus memiliki visi dan misi yang sama, masyarakat harus merasa memiliki sekolah, dan sekolah harus betul-betul menyatu dengan masyarakat. Masyarakat disini diartikan sebagai berikut: *A society is a population of humans characterized by patterns of relationships between individuals that share a distinctive culture and/or institutions* ([wikipedia](#): 2008).

Masyarakat harus terlibat secara langsung dan harus tahu sepenuhnya bagaimana kondisi sekolah dan apa yang harus dilakukan untuk sekolah. Demikian juga dengan pihak pengelola sekolah harus memberikan informasi tentang kondisi sekolah, kebutuhan-kebutuhan sekolah agar masyarakat tahu dan merencanakan secara bersama-sama bagaimana menciptakan sekolah yang berkualitas, sekolah dan masyarakat harus ada ikatan emosional yang kuat dalam membangun dan menciptakan sekolah yang efektif dan memiliki *output* yang berkualitas (Yahya A. Muhaimin, dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi 2001: xxxvi).

Partisipasi masyarakat menuntut otonomi dari lembaga-lembaga pendidikan yang berarti pendidikan terlepas dari birokrasi yang berbelit-belit dan menjadi lembaga yang profesional dengan tanggung jawab yang jelas. Otonomi pendidikan tidak akan mengurangi partisipasi masyarakat. di dalam penyelenggaraan pendidikan, kerjasama antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan akan sangat saling menguntungkan dunia pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah komite sekolah.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan saja. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat dan *stakeholder* lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat wadah yaitu Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Selain komite sekolah yang merupakan wadah yang mewakili orangtua murid pada sekolah, diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan orangtua dan masyarakat dapat berupa pengembangan finansial, kurikulum dan personalia, dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah, pola partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan di sekolah dasar.

Terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, program penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu menuntaskan wajib pendidikan dasar melalui program pendidikan “gratis” berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jenjang pendidikan dasar, sehingga Indeks Prestasi Murni (IPM) masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat ditingkatkan melalui peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pendidikan.

Program Pemerintah Nusa Tenggara Barat ini kemudian dijabarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di bawahnya, termasuk Kabupaten Lombok Timur. Keinginan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi, sampai pada masyarakat yang ada di pedesaan, salah satunya adalah Desa Perigi. Masyarakat Perigi menyerahkan pendidikan anak-anak mereka pada lembaga pendidikan formal yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Perigi terletak di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Perigi memiliki 7 sekolah dasar yang berada pada 6 dusun dan terdapat 2 sekolah

bergantung pada sekolah lain. Kondisi sekolah di Perigi bisa dianggap cukup layak sebagai tempat belajar, hanya saja terdapat beberapa sekolah yang kondisinya tidak memungkinkan, karena terdapat tiga ruangan untuk enam rombongan belajar (ROMBEL). bahkan yang lebih ironis lagi ada sekitar tiga sekolah yang kondisi ruangnya sangat tidak memungkinkan sebagai tempat belajar, karena terdapat dua ruangan untuk enam ROMBEL, yaitu SDN Paok Kambut yang bernaung di bawah SDN 1 Perigi, SDN 7 Perigi, dan SDN Jeringo yang merupakan bagian dari SDN 7 Perigi. Banyak persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi, kemudian menjadi persoalan “akut” yang harus segera dicari kejelasannya agar siswa dapat belajar dengan aman, tenteram dan nyaman, karena kondisi lingkungan belajar sangat mempengaruhi hasil belajar anak. Untuk menemukan penyebab timbulnya persoalan tersebut, maka diperlukan suatu kajian mendalam tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dasar, peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya, perhatian orang dan keluarga dalam pendidikan anak-anaknya, sedangkan sebagian besar masyarakat Perigi bertani sebagai sumber kehidupan sehari-hari masyarakat dan tingkat pendidikannya masih rendah.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan, untuk menuju tujuan yang sama. Manusia hidup berbudaya dan bermasyarakat (Arifin, 2001: 21). Dijelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki karakteristik dengan berelasi atau berhubungan diantara individu pada kultur atau institusi tertentu.

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols dan Shadily, 2006: 419), sedangkan dalam *Oxford Learner’s Pocket Dictionary* dijelaskan *participation means (actin of)* (Hornby, 2003: 311). Menurut Suryosubroto (2002: 280) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan inisiatip terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang baik pikiran maupun tenaga dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, mengevaluasi dan memperoleh manfaat dari program tersebut. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa esensi partisipasi adalah keterlibatan sikap dan perbuatan nyata dalam kegiatan menyusun rencana, melakukan, memanfaatkan hasil, mengevaluasi, menanggung resiko dan bertanggung jawab atas suatu program. Partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh frekuensi dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan persoalan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah dasar (SD) di Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, maka masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah desa yang merupakan wakil dari pemerintah harus berusaha membangun kemitraan dan bersama-sama mengembangkan konsensus dalam berbagai hal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Selain itu pemerintah desa yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kecamatan dan sekaligus pemerintah daerah harus berfikir komprehensif dan proaktif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terutama sekolah dasar yang ada.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

Dalam berpartisipasi masyarakat harus melakukannya sesuai dengan tanggung jawab dan kepentingannya. Hal ini diketahui sejauh mana anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut ikut berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. *Participation is the degree to which members of social system are involved in the decision-making process* (Rogers & Shoemaker, 1995: 286).

Peran serta yang sesungguhnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang, misalnya komite sekolah ikut serta dalam membicarakan dan mengambil keputusan

tentang rencana pembagian beasiswa. Subakir dan Sapari (2001) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program berupa: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan. 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. 3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil. 4) Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa apa saja yang relevan dalam menyelenggarakan pendidikan, baik berupa fisik maupun nonfisik. Dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 39 tentang peran serta masyarakat menyebutkan bentuk dan sifat peran serta masyarakat sebagai berikut: 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan dan pada semua jenjang pendidikan. 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran atau pembimbingan. 3) Pengadaan atau pemberian tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 4) Pengadaan program pendidikan yang belum diadakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional. 5) Pengadaan dana atau pemberian bantuan dapat berupa wakaf hibbah, sumbangan, beasiswa. 6) Pengadaan bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan KBM, 7) Pengadaan dan pemberian buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan KBM. 8) Pemberian kesempatan untuk magang. 9) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan untuk melaksanakan KBM. 10) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan. 11) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. 12) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sedangkan dalam bukunya Fullan (1982: 196) hasil penelitian yang dilakukan oleh Fantini dan beberapa peneliti lain mencatat bentuk-bentuk utama keterlibatan orang tua:

....we can list the main forms of parent involvement. 1) a. Instruction : at school (e.g., parent aides. b. Instruction : at home (e.g., parent as tutors). 2) Governance (e.g., parent advisory councils). 3) Home-school relations (e.g.,

project to increase community support). 4) Community service (e.g., adult education, use of facilities.

Mewujudkan Masyarakat Partisipatif

Upaya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar pada dasarnya harus dimulai dari bawah yaitu forum warga, baik yang bersifat administratif seperti forum RT, RW, maupun forum-forum warga yang berbasis pada kelembagaan dan komunitas, seperti kelompok tani, kelompok pengajian, kelompok tahlilan/yasinan, kelompok peternak, kelompok pedagang dan sebagainya. Masyarakat diajak untuk membicarakan berbagai persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di desa. Hal ini dilakukan dengan lebih mengefektifkan forum-forum tersebut tidak sekedar sebagai wahana untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi kebijakan desa, tetapi harus dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Warga masyarakat diajak berkumpul untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan atau persoalan lain yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar

Keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan memiliki banyak keuntungan, sebagaimana dikemukakan Rhoda (dalam Nurkolis, 1986). *Pertama* pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa berkembang secara signifikan, *kedua* orang tua siswa dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di sekolah, *ketiga* orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menerapkan formula-formula Positif untuk mendidik anaknya, *keempat* akhirnya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbagai institusi kemasyarakatan harus ditingkatkan wawasan, sikap, kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Lebih lanjut, Fasli Jalal (2001: 11) menjelaskan bahwa apabila lebih banyak institusi kemasyarakatan peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampu

menjangkau berbagai kelompok sasaran seperti kelompok wanita anak-anak kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil, dan sebagainya).

Kendala partisipasi

Pelaksanaan Pendidikan yang seharusnya mendapat perhatian penuh dari masyarakat dan pemerintah masih belum terpenuhi. Secara umum peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia rata-rata masih kurang. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat masih banyak mengalami kendala, banyak hal yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam hal pendidikan. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001: 195) menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan konsep pendidikan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, sistem perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah yang masih menganut sistem perencanaan (*top down*) yang mematikan kreativitas di lapangan dan membuka peluang untuk memanipulasi. *Kedua*, kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan kekuatan energi masyarakat untuk menganbil peran dalam melaksanakan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat memaksakan kehendak dan pengorbanan hasil program. *Ketiga* Sikap birokrat, birokrat belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan, masyarakat cenderung berperilaku sebagai penentu yang selalu ingin jadi ingin dihormati dan berkuasa karena merasa memiliki dana. Hal ini akan menyebabkan sikap apatis dari masyarakat dan menurunkan sikap masyarakat untuk berpartisipasi. *Keempat* kebutuhan belajar; karakteristik kebutuhan masyarakat untuk belajar sangat beraneka ragam, sedangkan sistem perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar. *Kelima*, sikap masyarakat; pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan sikap masyarakat masih perlu digugah. *Keenam*, budaya menunggu; sebagian besar masyarakat masih memiliki budaya yang statis, merasa puas dengan apa yang ada, bersifat menunggu, menerima, kurang proaktif untuk mengambil prakarsa dan melakukan tindakan yang bermanfaat untuk masa depan. *Ketujuh*, tokoh panutan; tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya berperan sebagai penuntun sering berperilaku sebagai birokrat. Hal ini

menyebabkan warga enggan untuk berperan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program. *Kedelapan*, lembaga sosial masyarakat; jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan masih sangat kurang. Hal ini mengakibatkan kelambanan dalam menggerakkan masyarakat terhadap pendidikan berbasis masyarakat berkurang. *Kesembilan*, anggaran; keterbatasan anggaran dukungan dan prosedur yang berbelit-belit dan keterbatasan sarana dan prasana belajar serta tenaga kependidikan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan berbasis masyarakat berkurang. *Kesepuluh*, egoisme sektoral; masih ada keraguan dari para petugas instansi yang berbeda tentang kepemilikan PKBM sebagai wadah pendidikan berbasis masyarakat, masih menonjolkan kekarakteristikanya masing-masing dan ada keinginan untuk saling berinteraksi. Hal ini mengakibatkan keengganan instansi untuk pendidikan berbasis masyarakat.

Komite Sekolah

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Proopenas 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah orangtua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*). Inti dari penerapan konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau

stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui komite sekolah.

Peran Komite Sekolah

Menurut Muh. Alif dan Soenarto (2008: 144) peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: (1) Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) Komite sekolah sebagai pendukung, (3) Komite sekolah sebagai pengontrol, (4) Komite sekolah sebagai mediator. Lebih lanjut Muh. Alif dan Soenarto (2008: 149) menjelaskan pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan juga relatif sama antara komite terdapat. Dukungan nampak sangat menonjol dalam penyusunan dan menetapkan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS) terutama dalam penggalangan dana dari orang tua siswa. Nampak adanya kecenderungan bahwa komite dibentuk dan difasilitasi oleh kepala sekolah sehingga wajar bila peran paling menonjol adalah sebagai badan pendukung pengelola sekolah.

Pendidikan Sekolah Dasar

Sekolah dasar (SD) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Sekolah dasar merupakan bagian dari pendidikan dasar Sembilan tahun sebagaimana terdapat dalam PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Dengan demikian sekolah dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Di Indonesia penyelenggaraan sekolah dasar berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis. Ada tiga komponen perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis penyelenggaraan sekolah dasar, baik sebagai satuan pendidikan maupun dalam kerangka sistem pendidikan nasional, yaitu (UUD 1945), undang-undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan PP No. 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan

kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota manusia serta mempersiapkan siswa mengikuti sekolah menengah (Ibrahim, 2006: 6).

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah studi *empiris* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dipilih dengan *purposive sampling* yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, ditentukan kepala sekolah, ketua komite sekolah, pemuda, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai *informan*. Data dikumpulkan melalui observasi, *interview*, studi literatur dan dokumentasi, dan analisis dengan teknik *Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian dan *triangulasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Perigi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dasar di Desa Perigi dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam observasi penelitian yang dilakukan pada semua dusun di Desa Perigi ditemukan banyak hal yang mempengaruhi tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Perigi. Ada beberapa faktor yang paling dominan dan sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu (1) tingkat pendidikan masyarakat, (2) tingkat pendapatan ekonomi, (3) *culture* (budaya), dan (4) komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Keempat faktor-faktor ini sangat menentukan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Perigi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar (SD).

Pendidikan masyarakat Perigi bisa digolongkan masih rendah, dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Perigi yang 10.627 ternyata sekitar 12,7 % tidak tamat sekolah dasar, 11,30% tamat sekolah dasar, sedangkan masyarakat yang tamat SMP

2,54% dan yang tamat SMA 1,91% dan S1 022%. Data ini jelas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat Perigi tidak tamat sekolah dasar dan bahkan lebih banyak yang buta huruf. Dari kondisi ini jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat Perigi sangat rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar di Perigi.

Sementara rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga salah satu faktor rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat ekonomi ini mempengaruhi bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Perigi. Dari data yang diperoleh oleh peneliti ternyata 62.40% masyarakat Perigi adalah petani. Untuk diketahui sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat adalah bertani musiman, artinya masyarakat bertani satu kali dalam satu tahun yaitu ketika turun hujan dan setelah itu masyarakat menganggur atau pergi ke daerah lain untuk berburuh. Dari semua kepala sekolah yang telah *diinterview* menyatakan bahwa untuk meminta bantuan dana kepada masyarakat agak sulit karena sebagian besar dari masyarakat di sini pendapatannya pas-pasan. Sedangkan dari segi *culture* (budaya) terlihat bahwa walaupun level ekonomi masyarakat agak tinggi akan tetapi karena kultur dari masyarakat tidak terlalu mementingkan pendidikan atau mereka menganggap pendidikan adalah bukan sebuah kebutuhan, jadi sebagian masyarakat enggan ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Upaya dan Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar

Belum ada upaya yang strategis yang bisa dilakukan. Pihak sekolah dan komite sekolah hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat bantuan fisik saja. Belum mengarah kepada partisipasi dalam bentuk perencanaan, penentuan kebijakan dan evaluasi program. Sedangkan partisipasi dalam bidang akademik atau peningkatan kognitif peserta didik hampir semua sekolah belum melibatkan masyarakat, itu artinya belum ada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sementara untuk melibatkan masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana pihak sekolah biasanya mengajak masyarakat berpartisipasi melalui komite sekolah. Misalnya ketika sekolah

ingin membangun ada beberapa sekolah mengajak masyarakat untuk menyumbang sesuai dengan pendapatan masyarakat.

3. Kendala Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar di Perigi

Partisipasi masyarakat yang dialami oleh semua sekolah dasar di Perigi secara umum masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan sikap masyarakat masih perlu digugah. Kemudian tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat kurang, hal ini menyebabkan masyarakat tidak tau apa yang harus dikerjakan dan apa yang akan diperbuat untuk sekolah. Berikutnya yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tingkat pendidikan masyarakat Perigi masih sangat rendah, tingkat pendapatan atau sosial ekonomi masih juga sangat rendah dan kurangnya komunikasi antara sekolah dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat yang dominan adalah dalam bentuk bantuan fisik saja yaitu gotong royong, itupun jika diminta oleh pihak sekolah, sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan, bantuan, perencanaan program, pengambilan keputusan dan lain-lain dalam pelaksanaan atau pengembangan pendidikan masyarakat masih belum banyak terlibat.
2. Dari hasil *interview* yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa belum ada upaya yang strategis yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar di Perigi. Pihak sekolah hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat bantuan fisik saja, sedangkan untuk

melibatkan masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana pihak sekolah biasanya mengajak masyarakat berpartisipasi melalui komite sekolah, misalnya ketika sekolah ingin membangun ada beberapa sekolah mengajak masyarakat untuk menyumbang sesuai dengan pendapatan masyarakat. Upaya pihak sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akademik dan keuangan sekolah masih belum dilakukan.

3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar di Perigi masih mengalami banyak kendala. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (1) tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, (2) kurangnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat, (3) tingkat pendapatan masyarakat yang masih kurang, dan (4) *Culture* (budaya) sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan bukan merupakan suatu kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Muh. & Soenarto. (2008) *Jurnal pendidikan dan evaluasi pendidikan, Pelaksanaan peran komite sekolah SMK di DIY, 1.44-49.*
- Arif Rohman. (2009) *Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan.* Yogyakarta. Laksbang Mediatama.
- Arikunto Suharsimi (2006) *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.* Jakarta, Rineka Cipta
- Bogdam Robert & Biklen (1982) *Qialitative research for education, an intriduction to theory and method.* United States. Allyn and Bacon.
- Columna Luis, Terry A Senne, Rebecca Lytle. (2008) *Communicating with Hispanic Parents of Children with and without Disabilities.* [Journal of Physical Education, Recreation & Dance](#). Reston: [Apr 2009](#). Vol. 80, Iss. 4; pg. 48, 7 pgs
- Dalton H. James, Maurice J Elias & Abraham Wandersman (2006) *Community psicology linking individuals an communities.* United State of America. Thomson Higher Education
- Daryanto. (2006). *Administrasi pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

- Davis, russell (2002) *Models and methods for systematic planning of education*, cambride, maasschusetts: Center for studies in education and development Harvard University.
- DEPDIKNAS. (1992) *Tentang peraturan pemerintah RI nomor 39, tahun 1999, tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional*. Diambil pada tanggal 19 juli 2008 dari <http://www.theceli.com/dokumen/produk/pp/1992/39-1992.htm>
- Echols M. Jhon & Hasan Shadily (2006) *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Glen Hass & Forrest W. Parkay (1974) *Curriculum planing a new aproach*. United Statesnof america: Allyn and Bacon
- Hornby (2003) *Oxpord learner's pocket dictionary*. Newyork: University Press
- Ibrahim (2006). *Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalal Fasli, Dedy Supriadi (2001) *reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yoyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa
- Khairuddin, Mahfiz junaidi, Mansur, Sudibyo H, Suhito H, Basuki H, Ahmad Ismail H, Nurasik & Mustofa Rahman (2007) *Kurikulum tingkat satuan pendidikan konsep dan implementasinya dimadrasah*. Yogyakarta, Nuansa Aksara.
- Michael Fullan (1982) *The meaning of educational change, teacher college*. Columbia University: Newyork and London
- Miles M.B & Huberman A.M. (2007) *Analisis tentang data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Muijs Daniel & David R (2008). *effective teaching evidence and practice*. London: Sage publication Ltd London
- Mundilarto (2007) *Konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta*. www.dikdasmen.Depdiknas.go.id/html/plp/01 PLP MPMBS KONSEP.htm
- Nasution S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nurkholis (2006) *Manajemen berbasis sekolah*. Jakarta: Grasindo
- Patilima Hamid (2007) *metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pidarta Made (2005). *Perencanaan pendidikan partisipatori dengan pendekatan sistem (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta

- Rasydi Univah & Sudarwan Danim (5 Nov 2007) *Paradigma guru dalam pendidikan dan dasar-dasar pedagoik*. Diambil pada tanggal 01 Januari 2008, dari <http://winithepooh.multiply.com/reviews/item/3?&item>.
- Rogers Everett M. & Floyd Shoemaker. (1995). *Diffusion of innovations*. New York: The Free Press
- Robert & Joanne (2000), *Fondation of education*. Allyn and bacon: university of Virginia.
- Suharjo (2006), *Mengenal pendidikan sekolah dasar*. Jakarta: Departemen pendidikan nasional direktoran jendral pendidikan tinggi direktorat ketenagaan.
- Sukron (27 Oktober 2005). *peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di MTsN 02 Semarang*. artikel 1005 diambil pada tanggal 23 Juli 2008: dari <http://re-searchengines.com/1005sukron.html>
- Subakir Supriono & achmad sapari. (2001) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: SIC
- Sugiyono. (2008). *metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan (r&d)*. Bandung: Alfa beta
- Suparjan & Suyatni. (2003). *pengembangan masyarakat dari pembangunan sampai pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Suryosuroto B (2002) *Humas dalam dunia pendidikan*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya
- Tilaar H.A.R. (2004) *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zainuddin Maliki (2008), *Sosiologi pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada press.
- Zubaidi. (2006). *Pendidikan berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____ (2008) *Peran guru dalam pendidikan*. diambil pada tanggal 19 juli 2008, dari http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar
- _____ (2008) *Society*. Diambil 20 November 2008 darl <http://en.wikipedia.org/wiki/Society>